

Asrama Indonesia Merdeka sebagai pembentuk Kader Muda Indonesia

Afifah Jasmine Krisdintami^{1*}, Kurniawati², Umasih³

¹Universitas Negeri Jakarta, Jl Rawamangun Muka Raya No. 11, Jakarta 13220, afifahjkrisdintami@gmail.com

²Universitas Negeri Jakarta, Jl Rawamangun Muka Raya No. 11, Jakarta 13220, kurniawati@unj.ac.id

³Universitas Negeri Jakarta, Jl Rawamangun Muka Raya No. 11, Jakarta 13220, umasih@unj.ac.id

*¹Corresponding email: afifahjkrisdintami@gmail.com

Abstract

This study examines the role of a dormitory called Dormitory of Free Indonesia. This dormitory was founded by a Japanese Navy officer, namely Rear Admiral Tadashi Maeda, in October 1944 with the aim of forming young Indonesian political cadres. The method used in this study is the historical method which includes five stages, namely the selection of topics with intellectual approaches, heuristics, verifications, interpretations, and historiography. Based on the results of the research, the Dormitory of Free Indonesia has played a role in forming young political cadres who will later take on roles after Indonesian independence through regeneration which is carried out in the dormitory. The regeneration activities at this dormitory include learning in classes for six months and martial arts taught directly by the Japanese army. Some of the students who graduated from Dormitory of Free Indonesia were Abdul Kadir Jusuf, Hasan Gayo, Sukarni, and Chaerul Saleh. There is controversy about the spread of communism in the dormitories, as historian Kahin points out. However, this news was later dismissed by national figures who taught at the Dormitory of Free Indonesia, including Admiral Maeda.

Keywords

Dormitory for Free Indonesia; Japanese; Koiso Declaration.

Abstrak

Penelitian ini ini mengkaji peran dari sebuah asrama bernama Asrama Indonesia Merdeka. Asrama ini didirikan oleh seorang perwira Angkatan Laut Jepang, yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda, pada bulan Oktober 1944 dengan tujuan untuk membentuk kader-kader politik muda Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang mencakup lima tahapan, yaitu pemilihan topik dengan pendekatan intelektual, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, Asrama Indonesia Merdeka berperan dalam membentuk kader-kader politik muda yang nantinya akan mengambil peranannya setelah kemerdekaan Indonesia melalui kaderisasi yang dilakukan di asrama. Aktivitas kaderisasi di asrama ini mencakup pembelajaran di kelas-kelas selama enam bulan dan seni bela diri yang diajarkan langsung oleh tentara Jepang. Beberapa murid-murid lulusan dari Asrama Indonesia Merdeka ialah Abdul Kadir Jusuf, Hasan Gayo, Sukarni, dan Chaerul Saleh. Terdapat kontroversi mengenai penyebaran paham komunis di dalam asrama, seperti yang dikemukakan oleh sejarawan Kahin. Namun, kabar ini kemudian ditepis oleh tokoh-tokoh nasional yang mengajar di Asrama Indonesia Merdeka, termasuk Laksamana Maeda.

Kata Kunci

Asrama Indonesia Merdeka; Janji Koiso; Jepang.

**Received: 27 July 2022*

**Accepted: 30 October 2022*

**Revised: 28 October 2022*

**Published: 31 October 2022*

PENDAHULUAN

Pendudukan Jepang di Indonesia bermula sejak ditandatanganinya Kapitulasi Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Pendudukan Jepang ini bertujuan untuk menopang Jepang pada Perang Pasifik sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua yang sedang berkecamuk. Kedatangan Jepang pada awalnya disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti halnya Belanda, kedatangan Jepang bermaksud untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Ketika masa pendudukan Jepang ini, Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu Sumatra yang ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16 yang mana keduanya berada di bawah Angkatan Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura, serta Kalimantan dan Indonesia bagian Timur yang dikuasai oleh angkatan laut (Ricklefs, 2007).

Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintahan militer Jepang menunjukkan bahwa mereka adalah saudara se-Asia bagi Indonesia dengan berbagai kampanye dan propaganda. Pihak Jepang mulai menghapuskan segala pengaruh Barat, mendirikan sebuah Kantor Urusan Agama (*Shumubu*), dan Gerakan Tiga A (Jepang pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia). Selain itu, Jepang pun membentuk banyak organisasi militer yang tujuannya untuk membantu Jepang di Perang Pasifik ataupun untuk keamanan Indonesia serta membentuk organisasi politik bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat) (Ricklefs, 2007). Propaganda-propaganda ini dianggap berhasil karena dapat menggugah rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia juga tidak terlepas dari salah satu rangkaian dari kebijakan politik imperialismenya di Asia Tenggara (Herlambang et al., 2021).

Pada bidang ekonomi, Jepang mewajibkan sebuah kerja paksa (*romusha*) yang sangat memberatkan. Ketika terjadi depresi ekonomi di Indonesia, pemerintah Jepang malah mewajibkan rakyat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, sehingga rakyat kewalahan. Hal ini menyebabkan banyak rakyat yang kelaparan bahkan meninggal dunia. Keadaan semakin diperparah dengan melemahnya kekuatan Jepang di Perang Dunia Kedua, salah satunya adalah Jepang harus kehilangan pangkalan angkatan laut di Saipan (Kepulauan Mariana) sehingga terjadi krisis kabinet di Jepang. Dengan berbagai situasi terdesak, pada tanggal 7 September 1944, muncul janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia yang diumumkan oleh Perdana Menteri Koiso. Koiso sendiri adalah orang yang pro kemerdekaan semu bagi Indonesia (Ricklefs, 2007). Masyarakat Indonesia menyambut berita tersebut dengan sukacita. Namun sayangnya euforia itu dengan cepat berakhir karena janji Koiso tidak dilanjutkan dengan langkah-langkah yang berarti.

Melihat hal tersebut, seorang perwira Jepang bernama Laksamana Maeda berniat untuk membangun sebuah asrama yang akan berguna untuk melakukan kaderisasi terhadap para pemuda Indonesia. Asrama yang dinamakan Asrama Indonesia Merdeka bertujuan untuk membentuk kader-kader politik muda Indonesia yang akan menjadi pemimpin selanjutnya setelah Indonesia merdeka nanti. Berkat kaderisasi yang dilakukan di Asrama Indonesia Merdeka, asrama ini banyak meluluskan kader-kader politik muda yang nantinya akan berjasa setelah Indonesia merdeka.

Dalam meneliti mengenai Asrama Indonesia Merdeka sebagai Pembentuk Kader Muda Indonesia (1944-1945), peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang relevan. *Pertama* adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Hanif Innaman N dengan judul Peranan Ahmad Soebardjo dalam Persiapan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini berisi mengenai peran Ahmad Soebardjo sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, dibahas pula mengenai keterlibatan Ahmad Soebardjo sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam Asrama Indonesia Merdeka yang didirikan oleh Laksamana Tadashi Maeda, lebih dari itu bahkan diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. *Kedua* ialah penelitian yang dilakukan oleh Arief Rahman Bramantya dengan judul Menghidupkan Ingatan (Kolektif) Aktivisme Jakarta *Kaigun Bukanfu* Selama Pendudukan Jepang di Indonesia dalam Koleksi Nishijima. Penelitian ini meneliti dengan menggunakan arsip-arsip terkait pembahasan mengenai Jakarta *Kaigun Bukanfu* dalam koleksi Nishijima, seorang anggota Jakarta *Kaigun Bukanfu*. Pada penelitian ini juga dipaparkan mengenai peran Laksamana Tadashi Maeda dan Jakarta *Kaigun Bukanfu* dalam mendirikan sebuah asrama dengan nama Asrama Indonesia Merdeka.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kaderisasi yang dilakukan oleh Asrama Indonesia Merdeka dalam rangka membentuk kader-kader politik muda Indonesia pada kurun waktu 1944-1945, mengetahui mengenai penyebaran paham komunis di asrama, dan mengetahui sanggahan para pengurus serta pengajar Asrama Indonesia Merdeka terkait adanya penyebaran paham komunis di asrama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan metode penelitian historis atau *historical research* dengan meliputi lima tahapan. *Pertama* adalah pemilihan topik. Pemilihan topik dapat dilakukan dengan kedekatan emosional atau kedekatan intelektual. Untuk pemilihan topik ini, peneliti menggunakan kedekatan intelektual yang didasari oleh peneliti telah membaca berbagai informasi mengenai Asrama Indonesia Merdeka, baik dari buku maupun artikel di internet. Namun, penelitian terkait asrama ini masih minim, sehingga peneliti ingin mengangkat topik mengenai Asrama Indonesia Merdeka sebagai sebuah penelitian sejarah. *Kedua* ialah pengumpulan atau penghimpunan sumber yang disebut juga heuristik. Sumber yang

dihimpun harus konsisten dengan topik yang ditulis. *Ketiga* adalah verifikasi yang juga sering disebut sebagai tahapan kritik. Dalam memverifikasi sumber sejarah, tahapan verifikasi dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi ekstern yang menguji mengenai autentisitas atau keaslian sumber serta verifikasi intern yang menguji mengenai kredibilitas sumber. *Keempat*, yaitu adalah interpretasi informasi sejarah yang diperoleh peneliti sejarah dari sumber-sumber sejarah. *Kelima* sebagai tahapan terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Hasil dari penelitian ini disajikan dengan bentuk penyusunan deskriptif naratif. Penulisan sejarah deskriptif naratif lebih merujuk kepada narasi yang menerangkan tentang penjelasan tersirat terkait apa yang terjadi, tanpa mengungkapkan hubungan kausal dan alasan di balik suatu peristiwa sejarah terjadi (Djono et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi dunia pada saat itu, yaitu Perang Dunia II (1939-1945). Jepang berusaha untuk menguasai negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Hal ini tidak lain karena didorong dengan slogan terkenal, yaitu *Hakko Ichiu* yang berarti delapan benang di bawah satu atap (Putri et al., 2018).

Setelah berhasil menyerang Pearl Harbour, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941, selanjutnya Jepang menyerang Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Militer Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur dan berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Setelah kurang lebih tiga bulan, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada penyerahan tanpa syarat tersebut, Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura (Poesponegoro & Notosusanto, 2011). Penyerahan ini sekaligus mengakhiri kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia.

Tujuan utama Jepang di Indonesia ialah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia agar dapat membantu Jepang dalam Perang Dunia II. Untuk itu, Jepang mengambil alih berbagai perkebunan, seperti kelapa sawit, tebu, dan juga tembakau. Selain itu, Jepang juga berusaha untuk menghapus segala bentuk pengaruh Barat di Indonesia dan memobilisasi masyarakat Indonesia agar dapat membantu Jepang memenangkan perang (F. Amelia, 2019). Pemerintah Jepang kemudian membagi Indonesia menjadi tiga wilayah pendudukan, yaitu Sumatra yang ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16 yang mana keduanya berada di bawah Angkatan Darat Wilayah ke-7 dengan markas besarnya di Singapura, serta Kalimantan dan Indonesia bagian Timur yang dikuasai oleh Angkatan Laut (Ricklefs, 2007).

Untuk menarik hati masyarakat Indonesia, Jepang banyak melakukan berbagai propaganda dengan pendirian departemen propaganda bernama *Sendembu* (Sahajuddin, 2019). Jepang kemudian memperbolehkan dikibarkannya bendera nasional Merah Putih dan dikumandangkannya lagu nasional Indonesia Raya. Selain itu, dipenjarakan pula semua penduduk Belanda. Jepang juga membentuk Gerakan 3A yang berdiri pada tanggal 29 April 1942. Gerakan 3A memiliki semboyan “Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia”. Sayangnya, gerakan ini dibubarkan karena tidak cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia (Kahin, 1995).

Di bidang politik, Jepang banyak mendirikan berbagai organisasi politik baru yang disebabkan karena Jepang memiliki kebijakan untuk membubarkan segala bentuk perkumpulan. Perkumpulan politik hanya diizinkan bagi organisasi politik yang memang didirikan secara langsung oleh Jepang, seperti Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan *Chuo Sangi In* yang bertindak sebagai badan pertimbangan pusat (F. Amelia, 2019). Namun, selanjutnya Putera dibubarkan karena banyak dari anggota Putera yang membangkitkan sikap anti-Jepang dan mendukung Sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1944, dibentuk *Jawa Hokokai*, yaitu Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa sebagai pengganti dari Putera (Kahin, 1995).

Di bidang ekonomi, Jepang memerintahkan rakyat Indonesia untuk menjadi tenaga kerja paksa atau romusha yang bekerja di pabrik, pelabuhan, maupun perkebunan dengan upah yang murah (Ranoh, 1999). Dengan upah dan makanan yang tidak seberapa, masyarakat Indonesia terlihat sangat memprihatinkan (Azzunah, 2011). Sebagian besar kuli yang dipekerjakan Jepang untuk pertambangan menderita penyakit tuberkulosis, tetapi mereka tetap dipaksa untuk bekerja dan akhirnya meninggal dunia (Suhartono, 2007). Selain itu, Jepang melakukan berbagai perlakuan buruk terhadap masyarakat pribumi, seperti pemerkosaan, perampokan, perdagangan manusia, diskriminasi rasial, dan kebencian terorisme oleh *Kenpeitai* sebagai polisi militer Jepang terhadap penduduk pribumi (Anderson, 1988).

Adanya keadaan-keadaan ini mendorong terjadinya perlawanan fisik dan perlawanan bawah tanah yang dilakukan oleh rakyat pribumi. Perlawanan fisik berhasil dipadamkan dengan aksi-aksi militer dari pemerintah Jepang, sedangkan untuk perlawanan bawah tanah diselesaikan dengan pendirian Angkatan Muda pada pertengahan tahun 1944. Pemerintah militer Jepang merekrut banyak orang yang secara aktif terlibat dalam gerakan bawah tanah dan memaksa mereka untuk mengambil posisi pemimpin Angkatan Muda. Hal ini membuat para tokoh-tokoh dari gerakan bawah tanah layaknya disekap dari luar oleh Jepang (Kahin, 1995).

Janji Kemerdekaan Koiso

Pada tahun 1944, tentara Jepang mulai terpojok dalam Perang Dunia II. Hal ini ditandai dengan pendudukan Amerika Serikat atas Pulau Saipan pada Juli 1944 yang terletak sangat dekat dengan kepulauan Jepang (Poesponegoro & Notosusanto, 2011).

Sebelumnya pada bulan Februari 1944, pasukan Amerika Serikat berhasil untuk mengusir pasukan Jepang yang ada di Kwajalein, Kepulauan Marshall. Keadaan juga semakin diperparah dengan adanya serangan bom B-29 telah terjadi di Jepang sejak Juni 1944 (Ricklefs, 2007).

Dengan segala bentuk kekalahan ini membuat Perdana Menteri Hideki Tojo mengundurkan diri pada tanggal 17 Juli 1944. Jatuhnya pemerintahannya ini menandai pergantian arah politik dari peperangan (United States Department of the Army, 1966). Jabatan selanjutnya diisi oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Salah satu langkah yang diambil Koiso sebagai perdana menteri Jepang yang baru ialah dengan mempertahankan pengaruh Jepang yang ada di negara jajahan, seperti Indonesia, melalui pernyataan atau janji kemerdekaan (Poesponegoro & Notosusanto, 2011). Janji kemerdekaan Jepang terhadap Indonesia tersebut diumumkan pada tanggal 7 September 1944. Kemerdekaan yang dijanjikan tersebut akan diberikan dengan syarat bahwa Indonesia harus memajukan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya (Djawa Baroe, 1944).

Pernyataan Koiso memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengembangkan semangat bagi rakyat Indonesia untuk bekerja sama dengan Jepang dalam melawan invasi Sekutu. Dengan itu, pemerintahan Tokyo berusaha untuk memperlambat proses pendudukan atas Jawa sebelum menuju kepada *self-government* yang telah dijanjikan secara politis serta untuk meningkatkan partisipasi rakyat Indonesia dalam pemerintahan (Penders, 2021). Seiring dengan janji Koiso tersebut, pada tanggal 9 September 1944, pemerintah militer Jepang mengizinkan bagi masyarakat Indonesia untuk menyanyikan kembali lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Selain itu, pemerintah militer Jepang juga mengizinkan untuk dikibarkannya bendera Merah Putih bersama bendera Jepang di kantor-kantor *Jawa Hokokai* (Daradjadi & Ilham, 2020). Tidak hanya itu, Jepang juga memperbolehkan penggunaan nama "Indonesia" yang menggantikan nama kolonial, yaitu Hindia Belanda (Romein, 1965).

Janji kemerdekaan Koiso disambut dengan sukacita oleh masyarakat Indonesia, termasuk tokoh nasionalis sekuler dan juga tokoh Islam. Tetapi, kebahagiaan masyarakat menghilang dalam sekejap mata. Hal ini ditunjukkan dengan tidak jelasnya waktu kemerdekaan Indonesia dan juga tidak ada perkembangan lebih lanjut yang konkrit terhadap janji kemerdekaan tersebut (Satoshi, 2018).

Peran Asrama Indonesia Merdeka dalam Membentuk Kader Muda Indonesia

Rakyat Indonesia merasa kecewa dengan janji kemerdekaan yang diberikan Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso. Hal ini disebabkan karena tidak ada kelanjutan yang berarti dari Pemerintah Militer Jepang terkait janji tersebut. Berangkat dari alasan ini, seorang perwira Jepang bernama Laksamana Muda Tadashi Maeda menginisiasi sebuah ide untuk membentuk sebuah asrama bagi para pemuda Indonesia. Asrama tersebut dinamakan Asrama Indonesia Merdeka atau disebut juga *Dokuritsu Juku* yang berarti Sekolah Kemerdekaan (Tempo, 1987). Laksamana Tadashi Maeda adalah

seorang kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang atau disebut juga *Kaigun Bukanfu* (Anwar, 2010).

Asrama Indonesia Merdeka adalah salah satu dari beberapa asrama yang didirikan sebagai bentuk gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang. Asrama ini didirikan di Kebon Sirih 80 pada bulan Oktober 1944 tepat setelah Pernyataan Koiso mengenai pemberian janji kemerdekaan “di kemudian hari”. Asrama ini dibiayai secara penuh oleh *Kaigun Bukanfu* (Wanhar, 2014). Menurut Maeda, pendirian asrama itu bertujuan sebagai sekolah bagi para angkatan muda untuk menerima ceramah-ceramah mengenai berbagai yang para pemimpin-pemimpin Indonesia kehendaki. Maeda sendiri merasa bahwa Indonesia akan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang cakap yang berasal dari generasi muda sehingga mengundang berbagai pemimpin nasionalis untuk mengajar di Asrama Indonesia Merdeka (Rose, 2010).

Sementara Maeda yang menjadi penyokong dan pelindung sebagai Angkatan Laut Jepang pada Asrama Indonesia Merdeka, Maeda mempercayakan Ahmad Soebardjo untuk menjadi pengelola tempat pendidikan. Hal ini berdasarkan kedekatan pribadi antara keduanya. Sebelumnya, Ahmad Soebardjo dipercaya menjadi anggota *researcher* Angkatan Laut Jepang di bawah naungan Maeda (N. Moh. Hanif Innaman, 2019). Operasi dari Asrama Indonesia Merdeka ini juga diawasi oleh dua pembantu dari Maeda, yaitu Tomegoro Yoshizumi dan Shigetada Nishijima. Keduanya adalah mantan agen intelijen Jepang yang sama-sama bersimpati dengan aspirasi-aspirasi nasionalis Indonesia. Maeda sempat mengusulkan keduanya sebagai pengelola asrama, namun keduanya menolak (Wanhar, 2014).

Setelah mengundang Ahmad Soebardjo, dirundingkanlah nama dari sekolah tersebut. Maeda memberikan usul jika sekolah dinamakan *Y Sei Juku*. Hal ini berkaitan dengan kata pertama dari instruksi Kaisar Jimmu, yaitu *Y Sei* dan secara harfiah berarti menumbuhkembangkan keadilan menurut kamus terbitan Shoten Iwanami. Selain itu, penyebutan *Y Sei* juga mirip dengan *Yosei* yang berarti untuk melatih. Namun, usul ini ditolak oleh Yoshizumi karena menurutnya akan lebih tepat jika menggunakan nama dari bahasa Indonesia. Usulan ini diajukan karena banyaknya kebencian rakyat Indonesia yang mengarah pada Jepang. Maka dari itu, sekolah pun diberi nama sesuai dengan usulan Ahmad Soebardjo, yaitu Asrama Indonesia Merdeka (Wanhar, 2014). Selanjutnya, terkait staf Indonesia, pilihlah Wikana yang sekaligus menjadi pengawas sekolah. Sebagai pengawas asrama, Wikana mengawasi kegiatan serta perkembangan Asrama Indonesia Merdeka untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ahmad Soebardjo (Djoyoadisuryo, 1978). Wikana merupakan seorang mantan aktivis dari Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo (Anderson, 1988).

Asrama Indonesia Merdeka hadir sebagai asrama yang menentang kapitalisme dan imperialisme (Legge, 2010). Menurut Laksamana Maeda, pendirian asrama itu bertujuan sebagai sekolah bagi para angkatan muda untuk menerima ceramah-ceramah mengenai berbagai yang para pemimpin-pemimpin Indonesia kehendaki (Anderson, 1988). Laksamana Maeda sendiri merasa bahwa Indonesia akan membutuhkan

pemimpin-pemimpin yang cakap yang berasal dari generasi muda, sehingga Maeda turut mengundang berbagai pemimpin nasionalis untuk mengajar di asrama (Rose, 2010). Di samping itu, Laksamana Maeda juga berharap bahwa sekolah yang disponsori oleh Angkatan Laut Jepang tersebut akan dapat menanamkan semangat kemerdekaan dalam konteks solidaritas Asia (Lebra, 2010).

Setelah perencanaan pembentukan Asrama Indonesia Merdeka rampung, Laksamana Maeda kemudian meminta Ahmad Soebardjo untuk mengatur guru-guru yang nantinya akan mengajar di Asrama Indonesia Merdeka sesuai bidang atau keahliannya masing-masing (Suhartono, 2007). Dalam waktu yang relatif singkat, Ahmad Soebardjo berhasil untuk menghimpun para tokoh nasional yang bersedia untuk memberikan pembelajaran di Asrama Indonesia Merdeka (Djoyoadisuryo, 1978). Para pengajar tersebut didominasi oleh kelompok Kaigun generasi tua, seperti Iwa Kusumasumantri (mengajar hukum kriminal dan perburuhan), Raden Pandji Singgih (mengajar nasionalisme dari pandangan budaya), Johannes Latuharhary, dan Maramis yang mana mereka adalah teman kuliah Soebardjo ketika bersekolah di Leiden (Bourchier, 2015). Pengajar-pengajar lainnya ialah seperti Ahmad Soebardjo sendiri (mengajar hukum internasional), Wikana, Soekarno (mengajar politik), Hatta (mengajar ekonomi, seperti koperasi), dan Sjahrir (Lebra, 2010). Beberapa tokoh lain seperti Moh. Yamin, Sanoesi Pane (mengajar sejarah Indonesia), Sunarjo, dan Amir Sjarifuddin juga disebutkan mengajar di asrama bentukan Maeda ini (Mrazek, 1996). Kebanyakan para pengajar dari Asrama Indonesia Merdeka serta penghuninya adalah mereka yang sebelumnya berasal dari Asrama Menteng 31 (Loebis, 1992).

Kurikulum Asrama Indonesia Merdeka didesain untuk mencakup subjek sebanyak mungkin. Hal ini dikarenakan Asrama Indonesia Merdeka bertujuan untuk membentuk para pimpinan Republik yang akan datang (Tempo, 1987). Para pimpinan republik ini diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup. Pembelajaran di asrama tersebut pun beragam, mulai dari nasionalisme, ekonomi, ilmu politik, sosiologi, hingga Marxisme (Romein, 1965). Berkaitan dengan ini, dalam asrama diharuskan adanya pembinaan ide-ide sosialisme di bawah perlindungan Maeda yang bersimpati dengan aspirasi sosialis (Legge, 2010). Keadaan ini didukung oleh beberapa pengajar yang condong beraliran sosialis, seperti Ahmad Soebardjo, Moh. Yamin, Iwa Kusumasumantri, dan Sjahrir (Hoesein, 2010).

Para murid yang mengenyam pendidikan di Asrama Indonesia Merdeka berusia 18 sampai dengan 20 tahun dengan lama waktu pendidikan kira-kira enam bulan (Kahin, 1995). Mereka dibebaskan dari biaya apapun karena keberlangsungan asrama dibiayai sepenuhnya oleh Angkatan Laut Jepang (Wanhar, 2014). Asrama Indonesia Merdeka merupakan semacam sekolah bagi para pemuda yang telah pernah memperoleh pendidikan sebelumnya (Bangun, 1996). Setelah resmi dibuka di Jakarta, beberapa waktu kemudian asrama serupa dibuka di dekat Surabaya (Kahin, 1995).

Berbeda dengan PETA, Asrama Indonesia Merdeka hanya memberikan mata pelajaran militer ala kadarnya, terutama pada seni bela diri. Pembelajaran seni bela diri

yang diajarkan, seperti karate, judo, kendo (Mrazek, 1996). Selain itu, diajarkan pula bela diri asal Jepang, yaitu *Bujutsu* oleh para instruktur AL Jepang. Yoshizumi dan Nishijima juga ikut serta untuk turut mengajar tentang perang gerilya dan masalah pertanian (Wanhar, 2014).

Angkatan pertama dari Asrama Indonesia Merdeka sebanyak kira-kira 30 orang lulus di bulan April 1945. Angkatan kedua memulai pendidikan dengan kira-kira 80 orang pada bulan Mei 1945. Pelatihan yang diberikan oleh asrama harus berhenti ketika Jepang melakukan penyerahan kekuasaan terhadap Sekutu karena kekalahannya saat Perang Pasifik (Anderson, 1988). Beberapa nama pemuda yang mengenyam pendidikan di asrama ini dan nantinya akan menjadi tokoh pergerakan terkemuka adalah Sukarni, Chaerul Saleh, D.N. Aidit, dan Adam Malik (Moehkardi, 2019). Hadir pula di dalamnya M.H. Loekman, Sidik Kertapati, dan Chalid Rasjidi yang juga mengikuti Asrama Angkatan Baru (Wanhar, 2014). Sebagian dari anggota asrama ini akan bergabung menjadi anggota Barisan Pelopor Istimewa di bawah pimpinan Sudiro (Ensiklopedia Jakarta, 2018).

Alumni-alumni dari Asrama Indonesia Merdeka banyak yang memegang peranan penting di daerah asalnya masing-masing pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Loebis, 1992). Hal ini menunjukkan bahwa Asrama Indonesia Merdeka memang memberikan peranan yang jelas terkait pembentukan kader-kader politik bagi para pemuda Indonesia. Salah satu lulusan asrama yang menonjol diantara yang lain adalah Abdul Kadir Jusuf yang lahir pada tahun 1923 dari Indramayu merupakan angkatan pertama Asrama Indonesia Merdeka. Sebagai salah satu pengajar, Sutan Sjahrir mencatat nama Jusuf sebagai murid yang sangat pandai. Hal ini juga dilakukan oleh Ahmad Soebardjo (Moehkardi, 2019).

Selain Jusuf, ada juga pengakuan dari Hasan Gayo, seorang tokoh nasional yang berasal dari Aceh yang menjadi murid dari asrama yang dikenal sebagai Asrama Kaigun ini. Pria kelahiran 1923 tersebut dalam wawancara bersama Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1983 mengemukakan bahwa baik Asrama Indonesia Merdeka ataupun Asrama Angkatan Baru Indonesia, keduanya saling berkomunikasi dengan baik (Wanhar, 2014). Menurutnya, maksud dari Ahmad Soebardjo beserta kawan-kawannya yang lain dalam membentuk Asrama Indonesia Merdeka adalah untuk melatih kader-kader serta tenaga-tenaga muda Indonesia dengan memberi mereka berbagai macam ilmu pengetahuan yang memiliki keterkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia yang merdeka (Mustoffa, 1986).

Penyebaran Paham Komunis di Asrama Indonesia Merdeka

Asrama Indonesia Merdeka didirikan oleh Laksamana Maeda yang diketuai oleh Wikana, seorang tokoh pemuda yang beraliran kiri. Di belakang layar, hadir pula Ahmad Soebardjo, seorang Ketua Penasihat Politik untuk Markas Besar Angkatan Laut Jepang di Jawa, yang membantu asrama (Bangun, 1996). Dengan fakta ini, maka bukan rahasia umum jika Asrama Indonesia Merdeka dilindungi oleh Angkatan Laut Jepang yang

condong ke kiri (Hoesein, 2010). Menurut Kahin, Laksamana Maeda beserta para perwira Angkatan Laut Jepang memang diduga berhaluan komunis internasional (Moehkardi, 2020). Beberapa pengajar dari Asrama Indonesia Merdeka merupakan orang-orang yang condong beraliran sosialis, seperti Ahmad Soebardjo, Hatta, Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Iwa Kusumasumantri (Hoesein, 2010).

Para pengajar yang bebas mengajar apapun membuat beberapa cendekiawan memperdebatkan koneksi Wikana dengan PKI yang mungkin akan berpengaruh pada kurikulum asrama (Lebra, 2010). Pada pertengahan tahun 1920-an, Ahmad Soebardjo disebut-sebut menjadi seorang komunis. Walaupun begitu, Ahmad Soebardjo dipercaya telah keluar dari pergerakan komunis sejak awal tahun 1930-an (Kahin, 1995). Sedangkan Wikana dikatakan sering mendiskusikan persoalan-persoalan dengan D.N. Aidit (Soe, 2005). Wikana yang merupakan seorang mantan Pemuda Gerindo tersebut menerima tawaran untuk bekerja di *Kaigun Bukanfu* dan menjadi pemimpin dari Asrama Indonesia Merdeka untuk menghindari kemungkinan ditangkap oleh *Kenpeitai* yang menganggap hampir semua tokoh nasionalis adalah komunis (Loebis, 1992).

Namun, Ahmad Soebardjo tidak menduga jika Wikana adalah seorang komunis (Soe, 2005). Dalam tesis doctoral yang ditulis oleh George Kanahale dengan judul *The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence*, Ahmad Soebardjo dikatakan tidak mengetahui latar belakang dari Wikana. Namun, fakta ini disanggah oleh Shigetada Nishijima yang menyebutkan bahwa Ahmad Soebardjo adalah orang yang menceritakan kepadanya terkait latar belakang Wikana, bahkan ketika Ahmad Soebardjo tengah bekerja di kantor cabang bagian riset *Bukanfu*, Nishijima memintanya untuk membuat suatu tulisan mengenai gerakan-gerakan pemuda menggunakan referensi Wikana (Tempo, 1987).

Asrama Indonesia Merdeka dikenal kontroversial karena Laksamana Maeda dan aparat intelijen yang membantunya dalam menyelenggarakan pembelajaran menyisipkan materi mengenai komunis pada kurikulum (Lebra, 2010). Pengajaran yang diberikan di Asrama Indonesia Merdeka pun memang memberikan penekanan pada pembelajaran komunis dengan mempelajari pentingnya nasionalisasi produksi dengan tema pokoknya adalah anti imperialisme dan anti kolonialisme, seperti ajaran komunis. Komunis yang beredar dan diajarkan di Asrama Indonesia Merdeka bersifat internasional, di mana para murid diajarkan bagaimana cara memandang perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam kacamata perjuangan internasional dalam rangka melawan imperialisme dan kapitalisme. Tujuan dari ajaran komunis ini adalah untuk mencapai keadilan sosial untuk dunia secara keseluruhan, tidak hanya Indonesia saja. Walaupun demikian, komunis yang diajarkan pada Asrama Indonesia Merdeka berbeda dengan komunis yang berkembang di Uni Soviet. Dalam pengajaran ini, anti kolonialisme tidak begitu penting daripada anti-fasisme. Selain itu, tidak dicantumkan pula pengajaran mengenai tuntutan Amerika Serikat dalam kebijakan Garis Depan Dimitrov (Kahin, 1995).

Menurut George McTurnan Kahin dalam buku *Revolusi Pemuda* karya Ben Anderson, Laksamana Maeda sudah meramalkan bahwa Jepang akan kalah dalam Perang Dunia II dan nanti Jepang akan jatuh ke bawah kekuasaan komunis atau setidaknya golongan-golongan ekstremis kiri, bahkan lebih lanjut lagi adalah adanya aliansi Jepang-Soviet setelah perang. Menurut Kahin pula, lulusan dari Asrama Indonesia Merdeka akan dijadikan sebagai barisan pemimpin-pemimpin muda di pusat yang paling strategis di Asia Tenggara dengan orientasinya yang mungkin komunis, tetapi sangat menentang Barat (Anderson, 1988).

Terkait adanya penyebaran paham komunis di Asrama Indonesia Merdeka tersebut, para tokoh yang terkait memberikan keterangannya. Menurut Wikana, Laksamana Maeda dan para pembantunya sangat tulus dengan bantuan mereka terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, terkait tuduhan mengenai adanya unsur-unsur komunis mungkin dikarenakan perpaduan antara Ahmad Soebardjo dan Wikana yang keduanya agak berbeda juga belum ada bukti yang jelas bahwa Wikana sudah menjadi seorang penganut paham komunis pada masa itu. Jika memang Wikana adalah seorang komunis, maka apa artinya menjadi komunis jika sempat ditahan oleh Belanda pada tahun 1940 terkait dirinya yang membantu menyebarkan lembaran berita komunis ilegal berjudul "Menara Merah" bersama para pemuda lainnya, seperti Adam Malik dan Pandu Kartawiguna. Ahmad Soebardjo merekrutnya karena Wikana mempunyai pengaruh yang luas di kalangan pemuda Gerindo dan juga karena ia miskin serta dalam bahaya penangkapan oleh *Kenpeitai* (Anderson, 1988).

Sutan Sjahrir merupakan salah satu pengajar di Asrama Indonesia Merdeka. Menurutnya, asrama ini cenderung longgar dari pengawasan Jepang serta longgar dari arus utama para tokoh nasionalis Indonesia. Sutan Sjahrir sendiri yakin dengan tujuan dari pendirian Asrama Indonesia Merdeka adalah untuk melakukan penetrasi dan mengontrol gerakan bawah tanah dari PKI. Sementara itu, Hatta percaya bahwa Laksamana Maeda dan bawahannya tulus dengan keinginannya untuk kemerdekaan Indonesia (Rose, 2010). Hal ini sejalan seperti apa yang diyakini oleh tokoh nasionalis lainnya, yaitu Soekarno (Suhartono, 2007).

Ahmad Soebardjo mengatakan bahwa teori tersebut terlalu dibuat-buat. Dalam memoarnya dijelaskan bahwa komunis tidaklah termasuk sebagai bahan pengajaran di Asrama Indonesia Merdeka. Hal ini bahkan dikatakan tidak mungkin, karena hingga waktu-waktu terakhir pendudukan Jepang di Indonesia, ideologi komunis masih dianggap berbahaya. Bahkan, para pejabat Jepang sendiri, baik yang berasal dari kalangan sipil maupun militer, lebih takut untuk sekadar mengucapkan kata komunis. Sebelum Perang Dunia II dimulai pun mereka didoktrin untuk menyatakan "*Nihon Shelsin*" atau "Jiwa Semangat Jepang" yang pada hakikatnya merupakan anti-komunis (Kompas, 1969).

Bantahan lain datang dari Shigetada Nishijima yang mengatakan bahwa inti kurikulum dari Asrama Indonesia Merdeka atau *Dokuritsu Juku* bukanlah mengenai komunis, tetapi sosialisme. Hal ini disebabkan ketika Perang Dunia II berlangsung,

banyak orang yang berpikir bahwa Indonesia perlu untuk berkembang ke arah sosialisme nasional, termasuk pihak Jepang. Banyak tokoh-tokoh nasional Indonesia yang sedikit banyak terpengaruh atau terpapar mengenai Marxisme ketika belajar di Eropa setelah Perang Dunia I. Sejak adanya gerakan kebangsaan atau kebangkitan nasional di negeri-negeri jajahan, salah satunya adalah Hindia Belanda yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita untuk menghapus beban kekuasaan kolonial, yaitu Belanda, nasionalisme merupakan pijakan yang sama dengan anti imperialisme. Nishijima sendiri meyakini bahwa adanya tuduhan bahwa Asrama Indonesia Merdeka ber kurikulum komunis, terutama yang datang dari bangsa Belanda, tentunya memiliki alasan tertentu (Tempo, 1987).

Menurut arsip Nishijima yang disimpan oleh Universitas Waseda, Jepang. Dalam interogasi pada tanggal 9 November 1946, Laksamana Maeda menjawab bahwa ia bahkan menghindari untuk membentuk pelatihan yang diberikan oleh Asrama Indonesia Merdeka dengan pola Jepang. Selain itu, Laksamana Maeda pun tidak berniat mempekerjakan para pemuda untuk tujuan tertentu setelah menyelesaikan pembelajaran di Asrama Indonesia Merdeka. Hal ini dilanjutkan Laksamana Maeda seperti yang dikutip dalam buku Joyce Lebra, yaitu bahwa gagasan mengenai Laksamana Maeda yang harus memanfaatkan Partai Komunis untuk kelanjutan skemanya telah menunjukkan bias yang tidak terduga terhadap dirinya. Menurut Laksamana Maeda sendiri, tidak ada seorang pun yang mengenal dirinya dengan cukup baik akan menyetujui gagasan gerakan seperti itu (Lebra, 2010).

Agaknya terlalu berlebihan jika membayangkan mengenai kemungkinan Jepang sesudah perang yang diramalkan akan bekerja sama dengan Uni Soviet. Hal ini dikarenakan para penceramah di Asrama Indonesia Merdeka sebenarnya serupa dengan guru-guru yang ada di Asrama Angkatan Baru Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, dan Sunario, dengan tambahan Sutan Sjahrir yang mencolok (Anderson, 1988). Menurut Poeze, teori mengenai adanya persekongkolan rahasia antara Jepang dan Uni Soviet dirasa dicari-cari terlalu jauh. Poeze menambahkan bahwa Laksamana Maeda telah memberanikan dirinya untuk menyatakan simpatinya demi perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui perbuatannya, walaupun Laksamana Maeda sendiri sering mengalami kesulitan sehari-hari di pemerintahan Jepang di Jawa. Mengingat kekalahan Jepang yang tidak terelakkan karena berada di depan mata, maka Laksamana Maeda berusaha untuk membantu para tokoh nasionalis Indonesia. Untuk itulah, pada masa menjelang hingga proklamasi Indonesia tiba, Aparat Angkatan Laut Jepang juga bersedia untuk membantunya mengenai masalah keuangan, persenjataan, prajurit, sarana angkutan, perhubungan, bahkan mendapatkan jaminan agar Jepang tidak dapat ikut campur. (Poeze, 2008).

KESIMPULAN

Asrama Indonesia Merdeka yang dibentuk oleh Tadashi Maeda dan didirikan di Kebon Sirih 80 pada bulan Oktober 1944. Asrama ini bertujuan untuk membentuk kader-kader politik muda yang nantinya akan berguna ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya. Asrama Indonesia Merdeka dianggap kontroversial pada zamannya dikarenakan kurikulumnya sangat bebas, bahkan memperbolehkan mengenai berbagai pembelajaran, termasuk komunisme. Adanya pembelajaran mengenai komunisme membuat beberapa cendekiawan berasumsi bahwa hal tersebut bertujuan untuk melakukan penetrasi terhadap tokoh-tokoh PKI di bawah tanah, salah satunya adalah Kahin. Mengenai tuduhan ini, Maeda menegaskan bahwa tidak pernah memiliki tujuan untuk mengarahkan murid-muridnya selain untuk membantu menyiapkan kader-kader politik muda. Pernyataan ini didukung oleh beberapa tokoh yang menilai usaha Maeda didasarkan ketulusan hatinya dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Asrama Indonesia Merdeka memiliki pengajar-pengajar penting yang diisi oleh para tokoh-tokoh nasional, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Iwa Kusumasumantri, Ahmad Soebardjo, dan lain-lain. Beberapa instruktur tentara Angkatan Laut Jepang juga ikut berpartisipasi dalam pengajaran dengan mengajarkan keterampilan dasar militer. Asrama ini berhasil meluluskan angkatan pertamanya pada bulan April 1945, Beberapa lulusan dari Asrama Indonesia Merdeka yang berperan sebagai kader muda Indonesia setelah kemerdekaan diantaranya adalah Abdul Kadir Jusuf, Hasan Gayo, Sukarni, Chaerul Saleh, D.N. Aidit, Adam Malik, M.H. Loekman, Sidik Kertapati, dan Chalid Rasjidi.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, B. (1988). *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan perlawanan di Jawa 1944-1945* (T. J. Rumbo (ed.). Pustaka Sinar Harapan.
- Anwar, H. R. (2010). *Sutan Sjahrir: Demokrat sejati pejuang kemanusiaan*. Penerbit Buku Kompas.
- Azzunah, S. L. (2011). *Peranan muslim masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Bangun, P. (1996). *Kolonel Maludin Simbolon: Lika-liku perjuangan pembangunan bangsa*. Pustaka Sinar Harapan.
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal democracy in Indonesia: The ideology of the family state*. Taylor & Francis Books.
- Daradjadi, R. M., & Ilham, O. K. (2020). *Pejambon 1945: Konsensus agung para peletak fondasi bangsa*. PT. Elex Media.
- Djawa Baroe*. (1944, 15 September). *Indonesia Merdeka! Kemerdekaan Indonesia dikemoedian hari didjanjikan oleh Dai Nippon Teikoku*.
- Djono, D., Joebagio, H., & Abidin, N. F. (2020). Gerak Sejarah integratif-multidimensional: Warisan Sartono Kartodirdjo bagi filosofi pendidikan sejarah menuju society 5.0. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 32–46.

<https://doi.org/10.36706/jc.v9i1.10258>

- Djoyoadisuryo, A. S. (1978). *Kesadaran nasional*. Gunung Agung.
- Ensiklopedia Jakarta. (2018). *Indonesia Merdeka, Asrama*.
<http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id/post/Indonesia-Merdeka-Asrama?lang=id>
- F, Amelia. (2019). *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Alpirin.
- Herlambang, M. L., Kurniawati, & Martini, S. (2021). Peran Mohammad Toha pada peristiwa Bandoeng Laoetan Api tahun 1945-1946. *Journal of Indonesian History and Education*, 2(2), 156–170.
- Hoesein, R. (2010). *Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati*. Penerbit Buku Kompas.
- Kahin, G. M. (1995). *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia* (P. N. B. Soemanto (Ed.)). UNS Press.
- Kompas. (1969, August 14). Kemerdekaan Indonesia berkat jasa perwira-perwira Angkatan Djepang Pro-Komunis? *Kompas*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Lebra, J. (2010). *Japanese-trained Armies in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Legge, J. D. (2010). *Intellectuals and nationalism in Indonesia: A Study of the following recruited by Sutan Sjahrir in Occupied Jakarta*. Equinox Publishing.
- Loebis, A. B. (1992). *Kilas balik revolusi*. UI Press.
- Moehkardi. (2019). *Bunga rampai sejarah Indonesia: dari Borobudur hingga revolusi nasional*. Gajah Mada University Press.
- Moehkardi. (2020). *Peran Surabaya dalam revolusi nasional 1945*. UGM Press.
- Mrazek, R. (1996). *Sjahrir: Politik dan pengasingan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mustoffa, S. (1986). *Sukarni dalam kenangan teman-temannya*. Penerbit Sinar Harapan.
- N, Moh. Hanif Innaman. (2019). *Peranan Ahmad Soebardjo dalam persiapan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945*. Universitas Negeri Jember.
- Penders, C. L. M. (2021). *The West New Guinea Debacle: Dutch decolonisation and Indonesia, 1945-1962*. Brill.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2011). *Sejarah nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan zaman Republik* (6th ed.). Balai Pustaka.
- Poeze, H. A. (2008). *Tan Malaka, gerakan kiri, dan revolusi Indonesia*. Pustaka Obor.
- Putri, T. A., Syaiful, M., & Arif, S. (2018). Propaganda Jepang dalam melancarkan kebijakan pendudukan di Indonesia tahun 1942-1945. *Pesagi*, 6(1).
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/15036>

- Ranoh, A. (1999). *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan teologis-etis atas kepemimpinan Kharismatis Sukarno*. BPK Gunung Mulia.
- Ricklefs, M. . (2007). *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*. Ikrar Mandiriabadi.
- Romein, J. (1965). *The Asian century: A History of modern nationalism in Asia*. University of California Press.
- Rose, M. (2010). *Indonesia free: A Political biography of Mohammad Hatta*. Equinox Publishing.
- Sahajuddin, S. (2019). Propaganda dan akibatnya pada masa pendudukan Jepang Di Enrekang (1942-1945). *Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya*, 10(2), 185–201. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.10>
- Satoshi, N. (2018). *Japan's colonial moment in Southeast Asia 1942-1945*. Taylor & Francis.
- Soe, H. G. (2005). *Orang-orang di persimpangan kiri jalan*. Bentang.
- Suhartono. (2007). *Kaigun Angkatan Laut Jepang : Penentu krisis proklamasi*. Kanisius.
- Tempo. (1987, 15 Agustus). *Hari-hari di bawah Tanah*.
- United States Department of the Army. (1966). *Reports of general MacArthur*. U.S. Government Printing Office.
- Wanhar, W. (2014). *Jejak intel Jepang: Kisah pembelotan Tomegoro Yoshizumi*. Penerbit Buku Kompas.